

REVITALISASI PARTAI POLITIK DALAM PENEGAKAN NEGARA DEMOKRASI DI INDONESIA

Oleh : Mustiqowati Ummul Fithriyyah, M.Si.

ABSTRAK

Partai politik merupakan elemen yang bertugas memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Tetapi dalam perjalannya partai politik yang ada lebih mementingkan politik kekuasaan ketimbang pendidikan politik rakyat, sehingga pemilu bukan menjadi sarana pendidikan politik, melainkan hanya untuk memperoleh dukungan suara. Partai politik terkesan hanya memperhatikan masyarakat di saat kampanye atau menjelang pesta demokrasi, setelah itu dilupakan dan dibubarkan tanpa ada yang namanya proses evaluasi. Maka akhirnya terjadi jarak cukup lebar antara rakyat dengan partai politik dan politisi yang menjadi wakil rakyat di DPR.

Maka disinilah perlu dilakukan revitalisasi partai politik. Partai politik harus mampu mengembalikan fungsi awalnya sebagai elemen yang bertugas memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika dikaitkan dengan partai politik, pendidikan politik bisa diartikan sebagai usaha sadar dan tersistematis dalam mentransformasikan segala sesuatu yang berkenaan dengan perjuangan partai politik tersebut kepada massanya agar mereka sadar akan peran dan fungsi, serta hak dan kewajibannya sebagai manusia atau warga negara.

Kata kunci: Revitalisasi Partai Politik, Negara Demokrasi

A. Pendahuluan

Istilah demokrasi makin didengungkan di berbagai negara dunia ketiga, baik di tingkat wacana maupun level gerakan sosial. Sebagai sitem politik, demokrasi telah menempati stratum teratas yang hampir diterima oleh berbagai Negara, karena dianggap mampu mengatur dan menyelesaikan hubungan sosial politik, baik yang melibatkan kepentingan antar individu dalam masyarakat, hubungan antar masyarakat, masyarakat dan Negara, serta hubungan antarnegara di dunia. Jatuhnya ideologi komunisme di uni Sovyet di tahun 1989, setidaknya, telah menjadi momentum penting bagi perluasan demokrasi sebagai wacana alternatif sistem politik.

Meluasnya ide-ide demokrasi itu terus diadaptasi oleh negara-negara di dunia.

Demokrasi dipandang sebagai tipe ideal dan memiliki level penghargaan yang besar bagi individu dalam proses politik. Semua anggota masyarakat memiliki hak yang sama dalam bidang social, ekonomi maupun politik. Demokrasi membuka kesempatan yang luas bagi rakyatnya untuk berpartisipasi secara aktif. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana idealisme demokrasi itu berjalan di Indonesia? Bagaimana sesungguhnya memaknai partai politik sebagai salah satu wadah yang dapat memberikan ruang pembelajaran bagi masyarakat untuk terwujudnya negara demokrasi di Indonesia tercinta ini?

B. Idealisme Demokrasi

Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani “demos” yang berarti rakyat dan “kratos” atau “kratein” berarti

kekuasaan atau berkuasa. Demokrasi dapat diartikan “rakyat berkuasa atau *government or rule by the people* (pemerintahan oleh rakyat). Dengan kata lain, demokrasi berarti pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung setelah adanya proses pemilihan umum. Jadi dalam system pemerintahan demokrasi dapat diartikan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat atau seperti yang dikatakan oleh Abraham Lincoln, “*the government from the people by the people and for the people*.”

Demokrasi telah tumbuh sejak zaman Yunani kuno, yaitu pada masa Negara kota (*city state*) Athena, sekitar abad ke-6 sampai ke-3 sebelum masehi. Athena dikenal sebagai Negara demokrasi pertama di dunia yang mampu menjalankan demokrasi langsung, artinya hak rakyat untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh rakyat (warga negara), bertindak berdasarkan prosedur. Sementara itu dalam demokrasi tak langsung para pejabat membuat undang-undang dan menjalankan program untuk kepentingan umum atas nama rakyat. Hak-hak rakyat dihormati dan dijunjung tinggi karena para pejabat itu dipilih dan diangkat oleh rakyat. Dalam demokrasi tidak dibenarkan adanya keputusan politik dari pejabat yang merugikan hak-hak rakyat apalagi kebijakan yang mencederai kepentingan rakyat.

Lary Diamond, Juan J Linz dan Seymour Martin Lipset memaknai demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan yang memenuhi tiga syarat pokok: 1) kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas di antara individu-individu dan kelompok-kelompok organisasi (terutama partai politik) untuk memperebutkan jabatan-jabatan pemerintahan yang memiliki kekuasaan efektif, pada jangka waktu yang reguler (teratur/tetap) dan tidak melibatkan penggunaan daya paksa; 2) partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga negara dalam pemilihan pemimpin atau

kebijakan, paling tidak melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara reguler dan adil, sedemikian rupa sehingga tidak satupun sekelompok sosial (warga negara dewasa) dikecualikan; dan 3) suatu tingkat kebebasan sipil dan politik, yaitu kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan untuk membentuk dan bergabung ke dalam organisasi, yang cukup untuk menjamin integritas kompetisi dan partisipasi politik.

Menurut Alamudi dalam Winataputra (2010:7.4) mengemukakan soko guru demokrasi adalah sebagai berikut:

1. Kedaulatan rakyat
2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah
3. Kekuasaan mayoritas
4. Hak-hak minoritas
5. Jaminan hak asasi manusia
6. Pemilihan yang bebas dan jujur
7. Persamaan di depan hukum
8. Proses hukum yang wajar
9. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional
10. Pluralisme social, ekonomi dan politik
11. Nilai-nilai toleransi, pragmatism, kerjasama dan mufakat.

Sedangkan menurut Budiarmo (1999) mengemukakan bahwa syarat-syarat untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah *Rule of law* ialah:

1. Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selain menjamin hak-hak individu, juga harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin,
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial tribunals*),
3. Pemilihan umum yang bebas,
4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat
5. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi,
6. Pendidikan kewarganegaraan (*civic education*)

Indonesia sejak awal berdiri sudah menjadikan demokrasi sebagai pilihan sistem politiknya. Cita-cita demokrasi telah menjadi cita-cita para pendiri negara. Maka sudah menjadi keharusan bahwa prinsip-prinsip demokrasi tersebut di atas harus dijalankan oleh pemerintahan Indonesia. Landasan Negara Indonesia sebagai Negara demokrasi inipun dipertegas dalam:

1. Pembukaan UUD 1945 alinea 4; "...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD negara RI yang berkedaulatan rakyat..."
2. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.

Hal ini berdasar pada cita-cita para *founding fathers* Republik Indonesia, bahwa sistem pemerintahan dan ketatanegaraan yang berlaku adalah mengikuti prinsip-prinsip demokrasi dan yang terpenting adalah : 1) kedaulatan berada di tangan rakyat, 2) jaminan hak-hak dasar warga Negara, 3) sistem perwakilan, 4) partisipasi warga negara dalam proses pengambilan keputusan, 5) persamaan di depan hukum bagi warga Negara, 6) *rule of law*, 7) pertanggungjawaban penguasa kepada warga negara.

Ada tiga asumsi yang membuat demokrasi diterima secara luas di dunia. Pertama, demokrasi tidak saja merupakan bentuk vital dan terbaik pemerintahan yang mungkin diciptakan, tetapi juga merupakan suatu doktrin politik luhur yang akan memberikan manfaat bagi kebanyakan Negara. Kedua, demokrasi sebagai sistem politik dan pemerintahan dianggap mempunyai akar sejarah yang panjang sampai zaman Yunani kuno, sehingga ia dapat menjamin terselenggaranya lingkungan politik yang stabil. Ketiga, demokrasi dipandang sebagai sistem yang paling alamiah dan manusiawi, sehingga semua rakyat di Negara manapun akan memilih

demokrasi bila mereka diberi kebebasan untuk melakukan pilihannya.

Demokrasi lebih dari sekedar seperangkat aturan dan prosedur konstitusional yang menentukan suatu pemerintah berfungsi. Dalam demokrasi, pemerintah hanyalah salah satu unsur yang hidup berdampingan dalam suatu struktur sosial dari lembaga-lembaga yang banyak dan bervariasi.

Jadi esensi dari demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip *trias politica* yang membagi ketiga kekuasaan politik negara yaitu; eksekutif, yudikatif dan legislatif, yang saling independen dan sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol jalannya pemerintahan.

C. Problematika Demokrasi Di Indonesia

Demokrasi merupakan terminologi politik yang paling sering digunakan. Namun juga paling problematik. Karena para pakar politik belum sepakat, apakah demokrasi itu sekedar alat untuk mencapai tujuan, ataukah menjadi tujuan itu sendiri.

Seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa demokrasi jika ditafsirkan secara bebas, merupakan bentuk kedaulatan di tangan rakyat. Berkaitan dengan cara mengorganisasi masyarakat modern, demokrasi pada dasarnya diletakkan melalui bentuk perwakilan (*representation*). Aspirasi atau kepentingan masyarakat banyak tidak bisa diformulasikan secara massif, namun melalui mekanisme perwakilan organisasi sosial politik. Ide pendirian partai-partai

politik untuk terlibat dalam pemilu, kemudian berfungsi mendudukkan wakil-wakilnya di parlemen, tidak lain merupakan bentuk demokrasi pada *level procedural* dan formal. Selanjutnya perwakilan dan rekrutmen politik ini akan mengisi pada formasi kekuasaan (eksekutif) atau pemerintahan yang akan menelurkan kebijakan-kebijakan publik. Pada titik inilah kemudian muncul persoalan-persoalan yang berkaitan dengan demokrasi, bahwa demokrasi tidak ayal dituduh sebagai politik yang elitis, di mana representasi berarti membatasi aspirasi rakyat secara massif, yang membuka peluang bagi permainan elit, tanpa ada kontrol publik secara terbuka.

Negara lebih dominan di dalam proses politik, di mana logika *top down* telah melemahkan rakyat. Simbol perwakilan dalam sistem parlemen juga dianggap telah gagal memfungsikan dirinya secara artikulasi atas kepentingan rakyat. Lemahnya lembaga kontrol inilah menjadi penyebab yang sangat mendasar atas meluasnya praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Gejala matinya nilai-nilai demokrasi juga tercermin pada lemahnya sikap kritis masyarakat di dalam merespon persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat. Persoalan mendasar yang patut menjadi perhatian adalah matinya struktur kesadaran di tingkat masyarakat bawah (*grass root*). Lembaga-lembaga social di tingkat lokal, yang terbukti memiliki pengalaman langsung bagi penerapan nilai-nilai demokrasi justru dimatikan oleh Negara

Alfian M. menyebutkan bahwa proses demokratisasi bila salah langkah mampu menyedot potensi ekonomi yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk keperluan lebih luas terhambat gara-gara tersedot untuk membiayai proses politik. Dan ongkos politik itu ditanggung rakyat secara “sukarela” (atau “paksa rela”?) mengorbankan segenap potensi ekonominya untuk berpolitik.

Selanjutnya penulis akan mencoba menyorot beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur atas tercapainya sebuah tatanan demokrasi sekaligus dapat menjadi hal yang dapat dikatakan sebagai problema untuk mewujudkan tegaknya demokrasi di Indonesia, antara lain:

1. Partai Politik

Dalam legitimasi sistem politik demokratis, partai politik menduduki posisi yang amat sangat penting. Keberadaan partai politik akan menjadi pendamping pemberi legalitas bagi pembentukan pemerintah dan kebijakan politik atas politik nasional.

Menengok dari sejarah, partai-partai politik Indonesia telah mengalami beberapa kali restrukturisasi. Perkembangan partai politik di Indonesia dapat digolongkan dalam beberapa periode perkembangan, dengan setiap kurun waktu mempunyai ciri dan tujuan masing-masing, yaitu : Masa penjajahan Belanda, Masa pedudukan Jepang dan masa merdeka.

a. Masa Penjajahan Belanda

Masa ini disebut sebagai periode pertama lahirnya partai politik di Indonesia (waktu itu Hindia Belanda). Lahirnya partai menandai adanya kesadaran nasional. Pada masa itu semua organisasi baik yang bertujuan sosial seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah, ataupun yang berazaskan politik agama dan sekuler seperti Serikat Islam, PNI dan Partai Katolik, ikut memainkan peranan dalam pergerakan nasional untuk Indonesia merdeka.

Kehadiran partai politik pada masa permulaan merupakan manifestasi kesadaran nasional untuk mencapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Setelah didirikan Dewan Rakyat , gerakan ini oleh beberapa partai diteruskan di dalam badan ini. Pada tahun 1939 terdapat beberapa fraksi di dalam Dewan Rakat, yaitu Fraksi Nasional di bawah pimpinan M. Husni Thamin, PPBB

(Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumi Putera) di bawah pimpinan Prawoto dan Indonesische Nationale Groep di bawah pimpinan Muhammad Yamin.

Di luar dewan rakyat ada usaha untuk mengadakan gabungan partai politik dan menjadikannya semacam dewan perwakilan rakyat. Pada tahun 1939 dibentuk KRI (Komite Rakyat Indonesia) yang terdiri dari GAPI (Gabungan Politik Indonesia) yang merupakan gabungan dari partai-partai yang beraliran nasional, MIAI (Majelis Islamil Aâ€•laa Indonesia) yang merupakan gabungan partai-partai yang beraliran Islam yang terbentuk tahun 1937, dan MRI (Majelis Rakyat Indonesia) yang merupakan gabungan organisasi buruh.

b. Masa Pendudukan Jepang

Pada masa ini, semua kegiatan partai politik dilarang, hanya golongan Islam diberi kebebasan untuk membentuk partai Masyumi, yang lebih banyak bergerak di bidang sosial.

c. Masa Merdeka (mulai 1945)

Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan, terbuka kesempatan yang besar untuk mendirikan partai politik, sehingga bermunculanlah partai-partai politik Indonesia. Dengan demikian kita kembali kepada pola sistem banyak partai.

Pertama pada 1955, Indonesia memasuki kehidupan politik yang sebenarnya dalam alam demokrasi, dengan diselenggarakannya pemilu pertama kali sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Tiga puluh partai politik bersaing memperebutkan kursi di parlemen. Konon, menurut saksi sejarah, pemilu kala itu disebut-sebut sebagai pemilu yang paling demokratis di Indonesia sepanjang sejarah. Hal itu dikarenakan bangsa kita baru saja mengalami euforia politik, dan seluruh bangsa bersaing dalam rasa senasib sepenanggungan. Semua

berlangsung secara terbuka dan *fair*, meski sarana komunikasi belum secanggih saat ini. Sampai akhirnya pemilu 1955 ini memunculkan 4 partai politik besar, yaitu : Masyumi, PNI, NU dan PKI. Masa tahun 1950 sampai 1959 ini sering disebut sebagai masa kejayaan partai politik, karena partai politik memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara melalui sistem parlementer. Tetapi pemilu kala itu membawa sebuah konsekuensi bahwa kekuatan politik kala itu menjadi terpecah dalam partai-partai dan sangat sulit diakurkan. Sistem banyak partai ternyata tidak dapat berjalan baik. Partai politik tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, sehingga kabinet jatuh bangun dan tidak dapat melaksanakan program kerjanya. Sebagai akibatnya pembangunan tidak dapat berjaan dengan baik pula. Masa demokrasi parlementer diakhiri dengan Dekrit 5 Juli 1959, yang mewakili masa masa demokrasi terpimpin.

Pada masa demokrasi terpimpin ini peranan partai politik mulai dikurangi, sedangkan di pihak lain, peranan presiden sangat kuat. Partai politik pada saat ini dikenal dengan NASAKOM (Nasional, Agama dan Komunis) yang diwakili oleh NU, PNI dan PKI. Pada masa Demokrasi Terpimpin ini nampak sekali bahwa PKI memainkan peranan bertambah kuat. Sampai akhirnya kekuatan politik Indonesia pada awal 1965 berpusat pada tiga kekuatan utama; Partai Komunis Indonesia, bung Karno dengan PNI nya, dan Angkatan Darat dengan Golkar-nya.

Setelah itu Indonesia memasuki masa Orde Baru dan partai-partai dapat bergerak lebih leluasa dibanding dengan masa Demokrasi terpimpin. Suatu catatan pada masa ini adalah munculnya organisasi kekuatan politik baru yaitu Golongan Karya (Golkar). Pada pemilihan umum thun 1971, Golkar muncul sebagai pemenang partai diikuti oleh 3 partai politik besar yaitu NU,

Parmusi (Persatuan Muslim Indonesia) serta PNI.

Pada tahun 1973 Soeharto berhasil mendorong 9 partai politik berfusi dua. Hanya satu yang dipertahankan, yakni Golkar, yang notabene dibentuk oleh Angkatan Darat dan pendiri Orde Baru. Empat partai politik Islam, yaitu : NU, Parmusi, Partai Sarikat Islam dan Perti bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Lima partai lain yaitu PNI, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba dan Partai IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Dengan demikian terjadi segitiga dalam politik kepartaian Indonesia; PPP, Golkar dan PDI. dan terus berlangsung hingga pada pemilu 1999.

Pada tahun 1999 Presiden Habibie membebaskan kehidupan kepartaian Indonesia yang menghasilkan Pemilu 1999 yang diikuti oleh 48 kontestan dan pada akhirnya tidak menghasilkan satu pemenang mayoritas (lebih dari 50%) dan dalam pemerintahan mendorong terbentuknya pemerintahan koalisi yang pada gilirannya mendorong ke bawah kinerja pembangunan. Dan terus berlanjut hingga pemilu tahun 2004 dan 2009.

Dari perjalanan sejarah partai di Indonesia seperti yang tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan partai politik dalam alam demokrasi adalah untuk mengartikulasi dan mengagregasi isu-isu politik yang ada. Di sini bisa difahami pernyataan para pakar bahwa sistem satu partai atau adanya satu partai yang sangat dominan sekalipun satu bangsa menganut doktrin demokrasi, sebenarnya justru tidak demokratis. Artikulasi dan agregasi kepentingan massa yang didominasi oleh satu partai mengakibatkan fungsi partai sebagai agen sosialisasi menjadi agen indoktrinasi politik.

Tumbangnya rezim orde Baru memungkinkan diselenggarakan sistem pemilu multi partai, maka sejak itu gerakan transisi ke demokrasi mulai menemukan momentumnya. Masyarakat Pasca reformasi mengharapkan hadirnya partai-partai baru sebagai prakondisi bagi terciptanya sistem pemerintahan demokratis, sehingga akan tercipta iklim demokrasi yang sehat. Sehingga banyak pekerjaan yang harus dikerjakan partai. Dan bila dilaksanakan partai hasilnya akan lebih maksimal, karena memiliki kekuatan massa dan kekuatan politik.

Partai politik merupakan elemen yang bertugas memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Tetapi dalam perjalanannya partai politik yang ada lebih mementingkan politik kekuasaan ketimbang pendidikan politik rakyat, sehingga pemilu bukan menjadi sarana pendidikan politik, melainkan hanya untuk memperoleh dukungan suara. Partai politik terkesan hanya memperhatikan masyarakat di saat kampanye atau menjelang pesta demokrasi, setelah itu dilupakan dan dibubarkan tanpa ada yang namanya proses evaluasi. Maka akhirnya terjadi jarak cukup lebar antara rakyat dengan partai politik dan politisi yang menjadi wakil rakyat di DPR.

2. Makna Pemilu

Di tengah kesangsian sebagian warga terhadap keberhasilan pemilu, hal yang lebih mendasar lagi untuk dipertanyakan adalah makna pemilu bagi perbaikan kualitas kehidupan bangsa secara keseluruhan. Pertanyaan makna pemilu sangat mendasar untuk dikedepankan, mengingat serangkaian pemilu yang diselenggarakan selama ini lebih banyak bersifat ritual-kosmetis belaka, alias tidak membawa banyak perubahan bagi warga pemilih. Kenyataan ini sangat ironis ketika pemilu dipersepsi sebagai (salah satu) wahana demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang berkomitmen dan

berintegritas moral tinggi dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa, seperti kemiskinan, pengangguran, buruknya kesehatan, ketidakadilan, tingginya angka buta huruf, dan lain sebagainya. Dikhawatirkan, absennya dampak perubahan ke arah lebih baik akan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap parpol dan para wakil rakyat yang pada gilirannya membunch menjadi apatisisme total terhadap proses politik dan demokratisasi di negeri ini dalam bentuk rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap pemilu (Golput).

Dalam kampanye pemilu seharusnya peserta pemilu dapat meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta pemilu. Namun pada prakteknya kampanye terbuka hanya bermodalkan hiburan yang menyebabkan kurang terdidiknya warga negara secara politik ini. Hal tersebut disertai dengan kecenderungan pasif dan mudahnya dimobilisasi untuk kepentingan pribadi dari para elite politik. Berakhirnya kemeriahan kampanye partai politik, meninggalkan persoalan yang belum terselesaikan pada pesta demokrasi yaitu proses pendidikan politik bagi warga negara.

Kampanye pemilu harusnya menjadi sarana kontrak politik melalui tatap muka, bukan jadi pesta hiburan musik atau goyang erotis lima tahunan. Dapat dikatakan dengan berakhirnya rangkaian pemilu, maka berakhir pula penetrasi warga negara dalam proses-proses pengambilan keputusan yang berkaitan erat dengan kehidupan mereka selama lima tahun kedepan. Sebuah proses demokratisasi yang sehat mensyaratkan adanya partisipasi politik yang otonom dari warga negara. Untuk menumbuhkan dan atau meningkatkan partisipasi politik yang otonom dari setiap warga negara, maka pelaksanaan pendidikan politik yang baik dan benar, mutlak diperlukan.

Setidaknya kita dapat melakukan refleksi mengenai penyelenggaraan pemilu. Masihkah pemilu kita anggap sebagai aktivitas artikulasi kedaulatan rakyat atau sekedar alat pengokohan legitimasi penguasa. Jawaban atas pertanyaan itu penting sekali karena akan menentukan gerak ke depan kita. Jika memang pemilu merupakan pengejawantahan dari kedaulatan rakyat, maka kekurangan-kekurangan yang telah kita lakukan selama ini perlu diperbaiki.

3. Rendahnya Kualitas Pilihan

Berdasarkan sebuah studi yang dilakukan oleh Francisco L. Rivera-Batiz, demokrasi jika dilakukan dalam mekanisme yang normal dan sehat memiliki korelasi yang tinggi terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga. Menurutnya, demokrasi yang mampu menghasilkan kesejahteraan adalah demokrasi yang berkelindan dengan penerapan tata-kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*clean and good governance*), dan bukan demokrasi berbasis korupsi dan politik uang. Proses demokratisasi dengan praktik politik korup hanya akan menggerogoti dan membunuh ruh demokrasi itu sendiri.

Parahnya lagi, pilihan warga terhadap figur caleg atau parpol tertentu bukan ditentukan atas pertimbangan-pertimbangan logis atau kalkulasi rasional akan sebuah keputusan politik, tetapi semata karena faktor uang (*money politics*) dan popularitas. Dua faktor ini merupakan persoalan ikutan akibat diterapkannya demokrasi langsung, tetapi keberadaannya justru akan menggerogoti proses demokratisasi itu sendiri. Inilah yang digambarkan oleh banyak ilmuwan sebagai persoalan melekat (*embedded*) sekaligus dilemma atau paradoks demokrasi. Di satu sisi, demokrasi bekerja di atas prinsip majoritarianisme, yakni segala keputusan politik ditentukan suara terbanyak. Di sisi

lain, prinsip majoritarianisme seringkali tidak menjamin kualitas sebuah pilihan.

Mestinya, aspek terpenting dalam demokrasi adalah proses pematangan dan pendewasaan politik warga negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Voting, referendum, dan pemerintahan oleh kelompok mayoritas menjadi elemen terpenting proses penentuan pilihan dalam demokrasi. Namun demikian, sejalan dengan penerapan prinsip majoritarianisme, selalu terdapat ruang publik terbuka untuk berdebat dan berdiskusi atas segala persoalan yang muncul di masyarakat, baik di tingkat publik maupun pemerintahan. Menurut sejumlah ilmuwan politik, proses semacam inilah yang membuat demokrasi lebih matang dan dewasa, bukan penerapan prinsip majoritarianismenya. Dalam konteks ini, John Dewey menegaskan bahwa yang lebih penting dalam proses pemilu bukanlah penerapan voting atau pilihan langsung masyarakat yang mengikuti prinsip majoritarianisme, tetapi proses bagaimana “mayoritas” itu menjadi “mayoritas.” Artinya, kualitas pilihan itulah yang sebenarnya jauh lebih penting ketimbang menggumpalnya suara pemilih pada pilihan tertentu. Mengikuti kerangka pikir ini, kualitas pilihan dalam pemilu jelas tidak ditentukan oleh kekuatan popularitas caleg, terlebih kekuatan uang. Di atas itu semua, kualitas pilihan sangat ditentukan oleh sejauh mana warga mendayagunakan segala potensi rasionalitasnya untuk menentukan baik-buruknya tatanan politik. Melalui pilihan politik rasional, warga merefleksikan harapan-harapan akan perubahan keadaan menjadi lebih baik melalui wakil-wakil yang telah dipilihnya. Kualitas pilihan warga ditentukan oleh bekerjanya prinsip rasionalitas atau kalkulasi untung rugi atas pilihan masing-masing, dan bukan kekuatan uang.

Pada kenyataannya, uang telah menjadi panglima dalam proses

demokratisasi di negeri ini. Ongkos politik yang terlalu mahal bagi caleg dan biaya pemilu yang terlalu mahal menjadi cerminan betapa demokrasi di negeri ini berjalan di atas prinsip ekonomi kapitalistik sempurna. Seorang caleg harus merogoh koceknya dalam-dalam, bahkan menggadaikan harta kekayaannya, demi menjadi caleg dalam pemilu. Seorang calon presiden, gubernur dan atau bupati harus didukung oleh sumber keuangan berlapis, baik dari dirinya sendiri maupun orang lain. Akibatnya, sistem politik semacam ini bisa menutup kemungkinan warga negara yang layak dicalonkan tetapi tipis dukungan finansial untuk maju dalam proses pemilu. Sistem semacam ini sebenarnya juga menggerogoti kualitas demokrasi itu sendiri, karena sebagian biaya politik menuju kursi kekuasaan ada hakikatnya diambilkan dari anggaran belanja negara yang berasal dari pajak warga masyarakat yang seharusnya diarahkan untuk kesejahteraan rakyat banyak.

Uang rupanya bukan saja telah membutakan nurani elit politik di negeri. Kekuatan uang juga telah mengalahkan akal sehat warga. Berbagai persoalan sosial dan tekanan ekonomi mendorong mereka bersikap pragmatis. Akibatnya, mereka rela menukarkan suara dalam pemilu dengan uang. Rakyat cenderung enggan memberikan suaranya bagi mereka yang berkantong tipis, sekalipun sistem pemilihan langsung tidak memengaruhi pilihan politik warga. Warga bisa saja menerima *money politics* dari caleg atau parpol tertentu, sembari menentukan suaranya sesuai pilihannya sendiri. Namun *money politics* tetaplah merusak. Uang yang sudah diinvestasikan selama proses kampanye bukanlah hadiah gratis, tetapi harus ditebus dengan cara mengurangi kualitas layanan yang seharusnya diterima oleh masyarakat. Ada adagium dalam dunia politik, “*Nothing is free lunch!*” Tidak ada yang gratis dalam politik. Semuanya perlu biaya, sekecil apapun.

D. Alternatif Solusi

Dari beberapa problematika di atas, maka beberapa alternatif solusi yang dapat penulis tawarkan adalah:

1. Reorientasi Mendasar tentang Partai Politik

Bahwa Partai politik harus mampu mengembalikan fungsi awalnya sebagai elemen yang bertugas memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika dikaitkan dengan partai politik, pendidikan politik bisa diartikan sebagai usaha sadar dan sistematis dalam mentransformasikan segala sesuatu yang berkenaan dengan perjuangan partai politik tersebut kepada massanya agar mereka sadar akan peran dan fungsi, serta hak dan kewajibannya sebagai manusia atau warga negara.

Karena itu ada baiknya kalangan LSM harus kembali mengambil peran lamanya, melakukan pendidikan politik rakyat dan melakukan gerakan demokratisasi, bahkan di level kebijakan, karena saat ini banyak anggota DPR yang lemah dalam melakukan *legal drafting*, sehingga perlu kontrol dan masukan dari LSM dan masyarakat, agar tidak melenceng dengan kepentingan publik.

2. Reorientasi Makna Pemilu

Pemilu adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasi aspirasi dan kepentingan warga Negara. Setidaknya ada empat fungsi pemilu yang terpenting: legitimasi politik, terciptanya perwakilan politik, sirkulasi elit politik dan pendidikan politik. Melalui pemilu, legitimasi pemerintah dikukuhkan karena ia adalah hasil pilihan warga Negara yang memiliki kedaulatan. Keberadaan serta kebijakan yang

dibuat pemerintah akan memperoleh dukungan dan sanksi kuat karena keduanya berlandaskan sepenuhnya pada aspirasi rakyat dan bukan karena pemaksaan.

Melalui pemilu seleksi kepemimpinan dan perwakilan dapat dilakukan secara lebih *fair* karena melibatkan warga Negara. Praktek demokrasi modern, yaitu melalui perwakilan dapat dilakukan sepenuhnya disini. Dengan pemilu pula maka akan terjadi pergantian elit kekuasaan secara lebih adil karena warga negaralah yang langsung menentukan siapa yang masih dianggap memenuhi syarat sebagai elit dan siapa yang tidak. Secara tidak langsung, ini berarti pula bahwa pemilu adalah alat kontrol warga Negara kepada penguasa apakah yang terakhir itu masih dipercayai atau tidak.

Sederhananya, pemilu adalah sebuah alat untuk melakukan pendidikan politik bagi warga Negara agar mereka memahami hak dan kewajibannya. Dengan terlibat dalam proses pelaksanaan pemilu, diharapkan bahwa warga Negara berkiprah dalam system demokrasi. Ia akan mengerti dan memahami posisinya sebagai pemegang kedaulatan yang sangat menentukan gerak serta perjalanan bangsa dan negaranya.

3. Membangun Kesadaran Masyarakat tentang Kualitas Pilihan

Dalam hal ini ada beberapa hal yang dapat ditawarkan; *Pertama*, format dan struktur politik yang dibuat oleh pemerintah tentang partai politik harus berdasarkan visi politik yang dilandasi kedaulatan rakyat, dengan memberikan tekanan pada terakomodirnya kebutuhan masyarakat dan juga dilindunginya hak-hak dasar warga Negara. Oleh sebab itu, seluruh perangkat perundangan dan institusi politik yang dibuat harus diukur sampai sejauh mana mengandung prinsip demokrasi.

Kedua, agar gagasan perlindungan hak-hak politik rakyat dapat dilaksanakan,

maka harus diciptakan lingkungan politik yang kondusif, yang dibuat dengan prinsip partisipatif. Artinya, melalui partai politik ataupun LSM, masyarakat diajarkan untuk dapat memiliki partisipasi dan bersikap mandiri dalam menentukan sikap politik. Sehingga ketika momen pemilu, masyarakat dapat menentukan pilihannya secara independen.

Ketiga, Partai politik perlu melakukan pembuatan model-model pemberdayaan alternatif terhadap masyarakat yang mampu menggerakkan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat. Program-program pemberdayaan masyarakat ini harus benar-benar berorientasi kepada rakyat, yang berbasis pada pengelolaan sumber daya alam yang ada. Selain partai politik, LSM dan ormas sosial keagamaan juga perlu semakin aktif dalam proses pemberdayaan ini. Elemen-elemen ini dapat membangun *linkage* dan *network* untuk menentukan strategi yang tepat bagi pemberdayaan masyarakat. Sehingga masyarakat menjadi sebuah kelompok yang mandiri dan kuat. Sehingga jika hal ini dapat tercapai, maka masyarakat tidak akan mudah terombang ambing dalam menentukan pilihan politik.

E. Penutup

Demikian makalah ini penulis buat, dengan harapan dapat memberikan kontribusi terhadap revitalisasi makna partai politik bagi penegakan demokrasi di Indonesia tercinta ini. Segala hal yang kurang baik, yang sedang menimpa negeri kita, hendaknya tidak menjadikan kita menjadi warga yang pesimis atau bahkan apatis. Mari kita bergerak, mulai dari hal terkecil apa yang bisa kita lakukan untuk republik tercinta ini. Perubahan ada di tangan kita.

Daftar Pustaka

- Alfian M dalam Riant Nugroho, *Reinventing Indonesia*, Jakarta, Media Komputindo, 2001
- Francisco L. Rivera-Batiz, "Democracy, Governance, and Economic Growth: Theory and Evidence," *Review of Development Economics*, 6 (2) 2002
- John Dewey, *The Public and Its Problems*, sebagaimana dikutip Jürgen Habermas, *Between Facts and Norms: Contribution to a Discourse Theory of Law and Democracy* Cambridge: MIT Press, 1999
- Leo Suryadinata, *Elections and Politics in Indonesia* Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2002
- Mark E. Warren, "What Does a Corruption Mean in a Democracy?," *American Journal of Political Science* 48/2 April 2004
- Muhammad A.S. Hikam, *Politik Kewarganegaraan, Landasan Redemokratisasi di Indonesia*, Jakarta, Erlangga, 1999
- Robert A. Dahl, "A Democratic Dilemma: System Effectiveness versus Citizen Participation," *Political Science Quarterly*, Vol 109, No. 1 Spring 1994
- Udin S. Winataputra, *Materi dan Pembelajaran PKN SD*, Jakarta Universitas Terbuka, 2010